

KATA PENGANTAR

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan dari Renstra Polda NTB dan Renstra Bidang TIK Polda NTB 2025 – 2029 yang bermuara pada pencapaian strategi kemitraan. Adapun kinerja Bidang TIK Polda NTB T.A 2025 dengan Out Come pembina teknis fungsi bidang TIK kepada seluruh Satker dan Satwil Jajaran Polda NTB serta melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia Polri agar mampu mengoperasikan perangkat dan aplikasi teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dalam peningkatan kualitas tersebut, telah diawali dengan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada dalam system ketatalaksanaan yang dianut, di samping itu juga Bidang TIK Polda NTB telah melaksanakan dan mempedomani Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/37/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penjabaran Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan kini saatnya seluruh Personel Bidang TIK Polda NTB diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan peningkatan kinerja personel Bidang TIK Polda NTB adalah agar Personel Bidang TIK Polda NTB mampu menyelenggarakan pembinaan fungsi bidang TIK. Bidang TIK Polda NTB menyadari bahwa perubahan akan sulit terjadi apabila tidak mampu melaksanakan tranformasi sistem Polri dari Sistem yang berorientasi pelayanan pasif kearah sistem yang berorientasi pelayanan aktif kepada Satker dan Satwil Jajaran Polda NTB. Oleh karena itu Bidang TIK Polda NTB akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan harapan Satker dan Satwil Jajaran Polda NTB.

Perubahan yang dilakukan hendaknya dapat menuju kepada manajemen yang efisien, efektif dan akuntabel, sehingga semua Satker yang ada di jajaran Polda NTB dapat mengelola anggaran berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Negara dan Masyarakat.

Pengukuran.....

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bidang TIK Polda NTB. Disamping itu juga dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, mewajibkan Polri untuk menyusun LKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, sehingga kinerja dan penyerapan anggaran akan tampak dalam laporan tersebut.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 berarti Bidang TIK Polda NTB telah melaksanakan kegiatannya dalam satu tahun sejumlah capaian kinerja Bidang TIK Polda NTB untuk Tahun Anggaran 2025 dituangkan kedalam Laporan Kinerja Bidang TIK Polda NTB Tahun Anggaran 2025.

Mataram, Januari 2026



KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB

YAYAN HARTADI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLDA NTB TA.2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Bahwa sebagai pertanggungjawaban Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan anggaran dan pendapatan belanja negara dalam rangka pelaksanaan fungsi, peran dan tugasnya, disusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2012 tentang penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, mengamanatkan agar setiap entitas pelaporan wajib dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mempertanggungjawabkan keuangan yang ada maka dibuatkan laporan kinerja instansi pemerintah Bid TIK Polda NTB Tahun 2025, sejalan dengan adanya reformasi birokrasi Polri yang pada intinya menghendaki transparansi, akuntabel dalam bidang kinerja yang dilakukan oleh Bid TIK Polda NTB, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat.

Susunan.....

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Maksud dan Tujuan dari pembuatan LKIP pada Satker Bid TIK Polda NTB T.A. 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Laporan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Bid TIK Polda NTB dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun anggaran 2025.

2. Tujuan

Penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijak lebih lanjut.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bid TIK Polda NTB

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

1. Kedudukan

Bidang TIK Polda NTB dipimpin oleh Kepala Bidang TIK disingkat Kabid TIK yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari berada dibawah kendali Wakapolda

2. Tugas

Bid TIK bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

3. Fungsi.

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatatusahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan pengolahan data serta pelayanan telekomunikasi;

c. Pembinaan.....

- c. Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, pengamanan sistem, penyajian informasi dan dokumentasi serta analisis dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi Kamtibmas, meliputi penyiapan dan penyajian data operasional dan pembinaan; dan
- e. Pemberian bimbingan, bantuan teknis penyelenggaraan TIK kepada satuan organisasi di lingkungan Polda.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bidang TIK Polda NTB didasari dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dengan Struktur Organisasi yang telah terbentuk Satker Bidang TIK Polda NTB berusaha untuk tetap mendukung segala kebijakan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Reformasi di Institusi Polri khususnya Polda sampai dengan tingkat terdepan yaitu Polsek. (Struktur Organisasi Terlampir)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi ,susunan organisasi dan tata kerja Satker Bidang TIK Polda NTB terdiri dari :

1. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bid TIK.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan/anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU, IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
- e. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

Dalam....

Dalam melaksanakan tugasnya Kasubbagrenmin dibantu oleh:

- a. **Urren**, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
- b. **Urmintu**, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
- c. **Urkeu**, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

2. Sub Bidang Teknologi Komunikasi disingkat Subbidtekkom

Subbidtekkom bertugas menyelenggarakan dan membina sistem dan teknologi komunikasi, meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan, pelayanan komunikasi, serta pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur jaringan komunikasi..

Dalam melaksanakan tugas, Kasubbidtekkom menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan sistem dan teknologi komunikasi di lingkungan Polda;
- b. Pengembangan dan penyelenggaraan teknologi jaringan komunikasi, meliputi teknologi media fisik komunikasi, teknologi interface communication (komunikasi antar muka), teknologi dan prosedur penyambungan dan perutean data dalam komunikasi;
- c. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan pelayanan sentra komunikasi; dan
- d. Pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem teknologi komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya kasubbid Tekkom dibantu oleh:

- a. **Urjarkom**, bertugas mengembangkan dan menyelenggarakan jaringan komunikasi, pengendalian frekuensi komunikasi radio, pengendalian pengalamatan Internet Protocol (IP), pemantauan dan pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio, jaringan komunikasi data, jaringan telepon, serta pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi;

b. Uryankom...

- b. **Uryankom**, bertugas menyelenggarakan pelayanan komunikasi, pelayanan sentra komunikasi, serta melakukan analisa dan evaluasi pada pelayanan sistem komunikasi; dan
 - c. **Urharkan**, bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem komunikasi meliputi sistem komunikasi radio, sistem komunikasi data, dan sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi telepon serta menginventarisasi material komunikasi melalui penerimaan dan pendistribusian material komunikasi.
3. Subbidtekinfo bertugas membina dan menyelenggarakan sistem dan teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Kamtibmas dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan, serta teknologi informasi komunikasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbid Tekinfo menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian sistem dan teknologi informasi di lingkungan polda;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan sistem pengumpulan dan analisis data guna pengembangan data warehouse dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras dan program aplikasi, dan keamanan sistem informasi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan sistem penyajian informasi meliputi penyajian informasi dalam bentuk tertulis, audio, video, dan layanan multimedia dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras, program aplikasi, dan keamanan sistem informasi;
- d. Pembinaan dan pengembangan infrastruktur/sarana dan prasarana, meliputi piranti lunak, piranti keras, pengelolaan situs dan keamanan sistem informasi termasuk fungsi pemeliharaan dan perbaikannya; dan
- e. Pemberian pelayanan dukungan teknis dan mengendalikan sistem dan teknologi informasi kepada Satfung/Satwil.

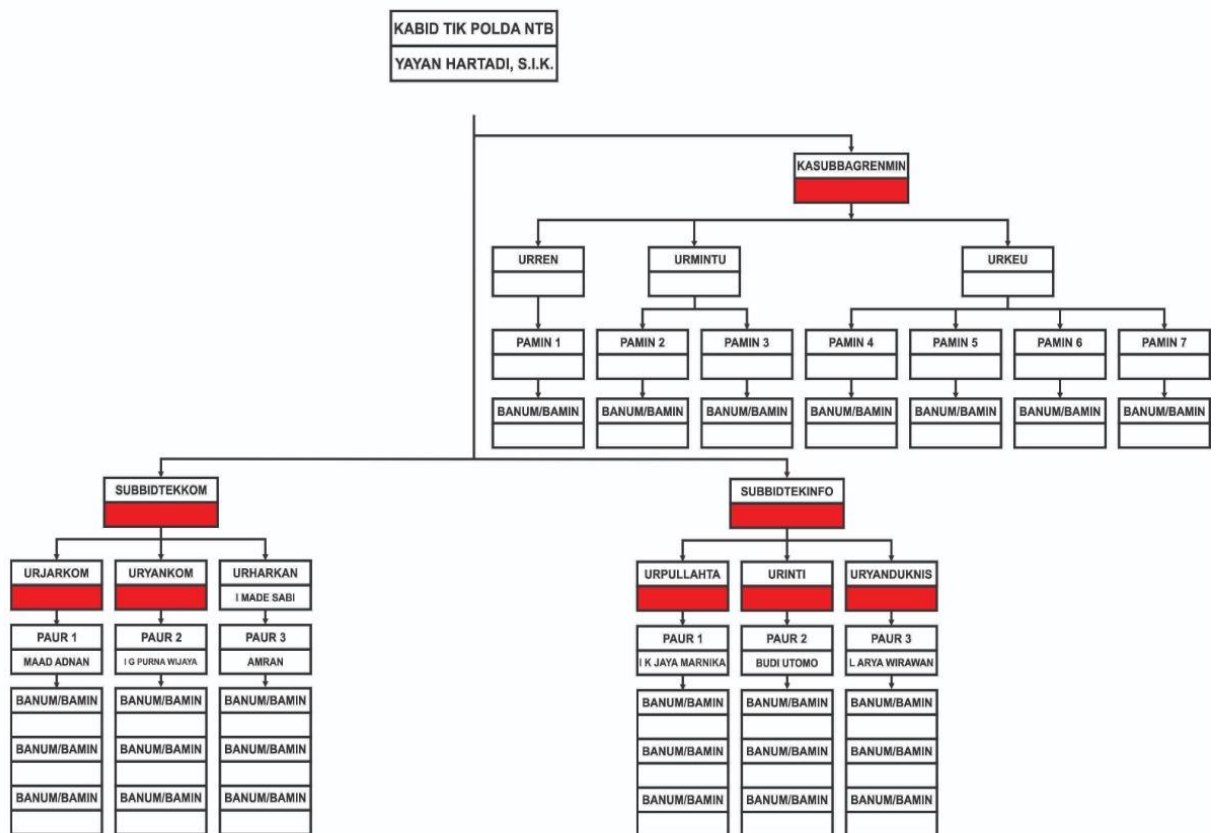
Dalam...

Dalam melaksanakan tugasnya Kasubbid Tekinfo dibantu oleh:

- Urpullahta**, bertugas mengelola sistem informasi untuk Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menyebarkan informasi termasuk pengkajian data;
- Urinti**, bertugas membina dan mengoperasikan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Polda;
- Uryanduknis**, bertugas membina dan mengendalikan manajemen layanan di bidang teknologi informasi di lingkungan Polda.

Struktur Organisasi Bid TIK Polda NTB

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



C. Analisis SWOT

1) Kekuatan

- a) Jumlah DSP Riil personel Bid TIK sebanyak 54 orang personel, sedangkan DSP sebanyak 51 orang personel. Dengan kelebihan 3 jumlah personel ini merupakan tambahan kekuatan tambahan yang dimiliki Satker Bid TIK, dengan klasifikasi :

(1) Polri : 49

(2) PNS : 5

(3) Struktur Pangkat

KOMBES : 1

AKBP : -

Kompol : 2

AKP : -

Inspektur : 2

BA : 44

TA : -

Pns Gol III : 3

Pns Gol II : 2

(4) Struktur jabatan

Kabid : 1

Kasubbid : 1

Kasubbag : 1

Kaur : 4

Pamin : 6

Paur : 3

Banum : 38

Pama :

Anjak : -

/b) Peralatan...

b) Peralatan yang dimiliki Bid TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai berikut :

(1) Ranmor R-4 : 10 unit

- Jeep : 2 unit

- Ops TSV : 8 unit

(2) Ranmor R-2 : 2 unit

(3) Mesin kantor

- Mesin PC : 15 unit

- Vicon : 1 Set

(4) Data Alkomlek

Tabel.1a
Data Alkom

NO	JENIS Alkom	KONDISI			JUMLAH
		BB	RR	RB	
1.	Repeater	21	2	7	30
2.	Link Repeater	5			5
3.	HT Analog 800 MHz	5.286	1.261	3.218	10.104
4.	Radio Mobile Analog	160			160
5.	Radio Fixed Analog	164			164
6.	Radio HF SSB			24	24
	Jumlah	5.636	1.263	3.249	10.487

c) Terjalannya kerjasama dengan instansi di bidang komunikasi seperti Orari, Rapi, PT. Telkom dan Operator Selular dalam mencegah aksi teror dengan jaringan komunikasi;

d) Tergelarnya jaringan internet Telkomsel *Flash* pada Polsek Jajaran yang tidak didukung infrastruktur Telkom guna mendukung sistem pelaporan online serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan teknologi berbasis IT;

/e) Tergelarnya...

- e) Tergelarnya jaringan internet untuk mendukung Aplikasi pelayanan publik berbasis IT GATARIN SAKTI di Polda NTB dan Polres Jajaran sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- f) Adanya sistem jaringan LAN dan WAN yang sudah tergelar di Mapolda NTB dan Polres jajaran sehingga sistem pelaporan secara *online* dapat beroperasi dengan baik;
- g) Tergelarnya jaringan internet untuk mendukung perangkat *Contact Center* Polri dengan nomor akses 110 guna mengetahui informasi dan pengaduan dari masyarakat NTB;
- h) Tergelarnya jaringan internet untuk mendukung Sistem Aplikasi Piknas di Polda NTB dan Polres jajaran dalam menghimpun data – data kriminalitas dan laka lantas di daerah guna mendukung informasi kriminalitas dan laka lantas tingkat nasional;
- i) Tergelarnya perangkat *Command center* di Polda NTB sehingga setiap potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polda NTB dapat dipantau dan diminimalisir.;
- j) Tergelarnya perangkat *Vicon* di Polda NTB dan Polres Jajaran sehingga komunikasi secara *audio visual* secara langsung dapat terlaksana dalam memberikan laporan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda NTB;

2) Kelemahan

- a) Masih kurangnya petugas yang memiliki keterampilan untuk merawat dan memperbaiki peralatan pendukung tugas pokok Kepolisian khususnya Alkomlek;
- b) Masih terdapat anggota yang belum memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga anggota mengalami kendala dalam mengoperasikan perangkat teknologi tersebut;
- c) Masih terdapat jabatan kosong yaitu Kaur Yankom, Kaur Jarkom, Kaur Yanduknis, Kaur Inti, Kaur Pullahta, dan Paur 1 Subbidtekkom;
- d) Masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus untuk beberapa penugasan khusus oleh para anggota Bidang TIK Polda NTB;

/d) Masih...

- e) Masih belum mampu dari segi anggaran dan sumber daya manusia untuk menerapkan teknologi informasi *online* dari Polsek ke Polda/Mabes Polri dan sebaliknya.

3) Peluang

- a) Kelebihan 3 jumlah personel ini merupakan tambahan kekuatan yang dimiliki Satker Bid TIK Personel Bidang TIK;
- b) Polda NTB yang memiliki keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Jumlah peralatan yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran komunikasi kewilayahaan dan kelancaran kirim terima informasi melalui teknologi internet dan intranet.

4) Ancaman

- a) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sudah tergelar dikarenakan masih minimnya kemampuan dan pengetahuan anggota dalam perawatan perangkat dimaksud;
- b) Sulitnya memperbaiki perangkat teknologi informasi dan komunikasi khususnya alkomlek dikarenakan keterbatasan *spare part* yang terdapat diwilayah NTB;
- c) Kurangnya petugas yang menjaga perangkat alkomlek yang ditempatkan pada site Polri maupun site PT. Telekom, TVRI, PLN sehingga perangkat rawan terhadap tindakan pencurian.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bid TIK Polda NTB Tahun 2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang;
- B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- C. Analisa SWOT;
- D. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis;
- B. Penetapan / Perjanjian Kinerja;

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi;
 - 2. Capaian Indikator Kinerja Utama;
 - 3. Indikator Capaian Kinerja;
- B. Akuntabilitas Keuangan / Realisasi Anggaran;
 - 1. Pendekatan penyusunan
 - 2. Kebijakan Akuntansi

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Tindakan Lanjut

Lampiran-lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja Bid TIK Polda NTB Tahun 2025 ;
- 2. Data Evaluasi Capaian Kinerja Polda NTB pada Satker Bid TIK Polda NTB T.A. 2025;
- 3. Surat Perintah Tim Penyusun LKIP Satker Bid TIK Polda NTB;
- 4. Dokumentasi kegiatan Bid TIK Polda NTB T.A. 2025.

BAB II.....

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Polda NTB dan Satker Bid TIK tahun 2025–2029 pada hakekatnya merupakan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap system, kebijakan, peraturan perundang - undangan terhadap moral personel Polri serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas serta produktifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. Renstra Polda NTB 2025-2029 dan Penetapan Kinerja Satker Bid TIK tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Lkip Bid TIK Tahun 2025.

Renstra Polda NTB tahun 2025–2029 disusun sebagai Pedoman dan Arahan dalam upaya pembenahan dan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pada Satker Bid TIK Polda NTB. Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok Satker Bid TIK Polda NTB tersebut, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran termasuk cara–cara untuk pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk Kebijakan, Program dan Kegiatan. Gambaran umum Rencana Strategis tersebut, secara garis besar dapat dilihat dalam Naskah LKIP ini.

1. Visi Bid TIK Polda NTB

**“Terwujudnya Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang profesional dan modern”**

2. Misi Bidang TIK Polda NTB

**“Peningkatkan Sarana Prasarana Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi”**

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita – citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Bidang TIK Polda NTB yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

/a. Menyelenggarakan ...

- a. Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan dan pembinaan Siskominfo Polri yang terintegrasi, handal dan aman;
- b. Meningkatkan dan tergelarnya Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- c. Meningkatkan kemampuan personel Polda NTB di bidang komunikasi dan informasi.

3. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan jangka waktu 5 (lima) tahun, Polri khususnya Polda NTB dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, rumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Polri khususnya Polda NTB untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi.

Oleh sebab itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, Adapun tujuan strategis Bid TIK Polda NTB sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan beroperasinya sarana prasarana infrastruktur TIK dan meningkatnya intelektual SDM personel BID TIK Polda NTB;
- b. Peningkatan integrasi kualitas, kuantitas pengumpulan dan penyajian data Kepolisian dari tingkat pusat sampai ketingkat bawah.

Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana polri bertujuan Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.

Program Dukungan Manajemen bertujuan menyelenggarakan fungsi menejemen berintegritas dan berpihak pada perlindungan masyarakat melalui giat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu ,akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri, Polda NTB dan Kewilayahan (Polres).

4. Sasaran Prioritas Bid TIK Polda NTB

Sasaran Strategis Bid TIK Polda NTB dalam kurun waktu lima tahun perencanaan (2025-2029) yaitu :

1) **Sasaran Inti (SI)**

Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdaya guna dan modern dengan IKU : **“Indeks Infrastruktur Strategis TIK”**

- a) Indeks infrastruktur SPBE yang profesional dan modern (IKU.1);
- b) Indeks kualitas data Kepolisian yang akuntable (IKU.2).

2) **Sasaran Strategis**

- a) Infrastruktur SPBE yang profesional dan modern (SS.1)
- b) Terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akuntable (SS.2)

Dari kedua sasaran strategis Bid TIK Polda NTB diatas di dukung 4 (empat) Indikator Kinerja Pendukung.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Bid TIK Polda NTB

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Bid TIK Polda NTB Tahun 2026, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Sasaran Prioritas I *“Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana yang berbasis IT”* dengan arah kebijakan ***“berkembangnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum”*** dan strategi yang dilakukan adalah :

- 1) Mewujudkan pengembangan teknologi Kepolisian dan system informasi yang berkelanjutan dan berintegritas; (*giat5053/prog1/Program modernisasi altmatsus dan sarana prasarana Polri*).
- 2) Mewujudkan pengembangan pusat informasi keamanan nasional yang terintegrasi ke Mabes polri. *giat5053/prog1/ Program modernisasi altmatsus dan sarana prasarana Polri*).

/b. Sasaran...

- b. Sasaran Prioritas II *"Terwujudnya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Polda yang modern"* dengan arah kebijakan ***"Terbangunnya system teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu mulai dari Polda sampai dengan Polres"*** dan strategi yang dilakukan adalah :
- 1) Mengoptimalkan/Menggelar jaringan komunikasi data dan suara sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung system pelaporan Kamtibmas; (*giat5053/prog1/ Program modernisasi altmatsus dan sarana prasarana Polri*).
 - 2) Mengembangkan system komunikasi berbasis radio untuk mendukung Operasi Kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan disetiap fungsi dan wilayah. (*giat5053/prog1/ Program modernisasi altmatsus dan sarana prasarana Polri*).
- c. Sasaran Prioritas III *"Terwujudnya pengoptimalan/penggelaran Alkom dan Multimedia serta jaringan VPN-Ip/Internet"* dengan arah kebijakan ***"Optimal dan tergelarnya jaringan Alkom dan VPN-Ip/Internet di satuan kerja di Polda dan satuan kerja di Kewilayahan"*** dengan strategi yang dilakukan adalah ***"Mengembangkan system komunikasi perkantoran berbasis IP untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polda dan satuan kerja di Kewilayahan secara efektif dan efisien"***; (*giat3071/prog2/ SP3/SS/IKP3/PPK prog 4, giat 9, Renaksi 035*).
- d. Sasaran Prioritas IV *"Terwujudnya personel Polri/PNS Polri yang profesional di bidang IT"* dengan arah kebijakan :
- 1) Meningkatnya keterampilan serta pengetahuan personil Bid TIK Polda NTB dan Jajaran serta bertambahnya masa pakai Alkomlek dan strategi yang dilakukan adalah : (*giat3071/prog2/ Program dukungan manajemen*).
 - a) Melakukan reformasi/pengelolaan SDM secara professional sesuai dengan kompetensi dasar SDM dibidang IT;
 - b) Meningkatkan kesejahteraan SDM.
 - /2) Meningkatkan...

- 2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri dan strategi yang dilakukan adalah : (*giat3071/prog2/ Program dukungan manajemen*)
 - a) Mengikut sertakan personel untuk melaksanakan Dikjur/Pelatihan dibidang IT baik di Mabes Polri atau di instansi terkait;
 - b) Mengadakan pelatihan kepada personel Bid TIK dan jajaran.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja Bid TIK Polda NTB

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Bid TIK Polda NTB Tahun 2025 merupakan wujud Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Bid TIK Polda NTB Tahun 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polda NTB Tahun 2025 ini pada

/hakekat...

hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja Bid TIK Polda NTB Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Perjanjian Kinerja Polda NTB tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel.1
Penetapan / Perjanjian Kinerja Bid TIK TA. 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern	Indeks infrastruktur strategis TIK.	81% (2,6)
2	Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern	Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern.	75% (2,00)
		Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel.	86% (3,2)
3	Terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akuntabel	Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet.	75% (2,00)
		Indeks Katpuan fungsi TIK.	75% (2,00)
		Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data.	86% (3,2)
		Indeks pengolahan dan penyajian data.	86% (3,2)

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri diantaranya pemenuhan Alkom berupa pengajuan rencana kebutuhan Alkom ke Mabes Polri, melaksanakan pengoperasian infrastruktur TIK yang ada di Polda NTB secara maksimal, pengoptimalan/penggelaran jaring Alkomlek berupa Repeater dan Link Repeater guna kelancaran komunikasi operasional Polri dalam rangka mendukung operasi Kepolisian Kewilayahan, melaksanakan pengoptimalan/penggelaran Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet berupa pelaksanaan video conference dan pelaporan data secara online, serta melaksanakan pelatihan design grafis dan harwat Alkomlek guna meningkatkan kemampuan Anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan teknologi Informasi.

/Berbagai...

Berbagai kegagalan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bid TIK Polda NTB pada tahun sebelumnya akan dilakukan upaya-upaya perbaikan maupun penanggulangannya sebagai antisipasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik dan akuntabel pada tahun berikutnya, dengan melakukan perencanaan program dan kegiatan serta sasaran dan penetapan indikator yang lebih tajam dan terarah, upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan dalam rangka memelihara situasi kamtibmas yang kondusif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bid TIK Polda NTB tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam **tabel.2**. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya. Bid TIK Polda NTB telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi guna bahan *feedback* dalam rangka peningkatan capaian kinerja Bid TIK Polda NTB di masa mendatang.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: 18 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penyusunan indikator kinerja utama dilingkungan Polri, maka Bid TIK Polda NTB telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Bid TIK Polda NTB, dalam suatu organisasi terdapat suatu indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan atas tingkat keberhasilan kinerjanya, oleh sebab itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, yang disebut dengan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*), dimana capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi serta peran yang diembannya.

**SKEMA PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BID TIK POLDA NTB 2020-2025**

TABEL.2

a. Indeks infrastruktur strategis TIK (IKU)

INDIKATOR KINERJA	IKU.SI. INDEKS INFRASTRUKTUR STRATEGIS TIK					
Indeks Infrastruktur Strategis TIK merupakan nilai total dari seluruh indikator kinerja pendukung dengan pembagian masing-masing IKP pada Satker Bid TIK Polda NTB.	Indeks Infrastruktur Strategis TIK mengukur kemampuan organisasi untuk menerapkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan inovasi, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan data digital dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktifitas, dan efisiensi kerja. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital. Indeks Infrastruktur Strategis TIK menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Indeks pengoptimalan/penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet • Indeks Katpuan fungsi TIK • Indeks pengumpulan data • Indeks pengolahan, penyajian data					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	80% (2,5)	81% (2,6)	84% (2,92)	85% (3,02)	87% (3,13)	89% (3,23)
Formula	Karakteristik					
$I = \frac{T}{2}$ Keterangan : I : Indeks Infrastruktur Startegis TIK T : Indeks Total IKU.1 dan IKU,2	Satuan pengukuran			Polarisasi		
	Indeks			Maksimal		
	Dimensi			Periode Pemantauan		
	Kinerja Utama			Tahunan		
	Sumber Data					
	Satker jajaran Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
	Seluruh Subbid/Subbag Pada Satker Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data			Pengesahan		
	Subbidtekinfo					

/b. Indeks...

TABEL. 3
b. Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan Modern (IKU.1)

INDIKATOR KINERJA	IKU.1 - SS.1. INDEKS INFRASTRUKTUR SPBE YANG PROFESIONAL DAN MODERN					
Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern merupakan nilai dari indikator kinerja pendukung dengan pembagian masing-masing IKP pada sasaran strategis pertama Satker Bid TIK Polda NTB.	Indeks Infrastruktur SPBE yang profesional dan modern mengukur kemampuan organisasi untuk menerapkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan inovasi, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan data digital dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktifitas, dan efisiensi kerja. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital. - Indeks Infrastruktur Strategis TIK menggunakan data dari indikator kinerja berikut: - Indeks pengoptimalan/penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet - Indeks Katpuan fungsi TIK					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
Formula	Karakteristik					
$ii = \frac{I.Ops + IK}{2}$ Keterangan : ii : Indeks Infrastruktur SPBE yang profesional dan modern I.Ops = Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet IK = Indeks Katpuan Fungsi TIK	Satuan pengukuran		Polarisasi			
	Indeks		Maksimal			
	Dimensi		Periode Pemantauan			
	Kinerja Utama		Tahunan			
	Sumber Data					
	Satker jajaran Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
	Seluruh Subbid/Subbag Pada Satker Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data			Pengesahan		
	Subbidtekinfo					

TABEL. 4

c. Indeks pengoptimalan/ pengeluaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (IKP.1)

INDIKATOR KINERJA		SS.1 IKP.1 : Indeks Pengoptimalan/Penggelaran Alkomlek, Multimedia dan Jaringan VPN-IP/Internet					
Indeks pengoptimalan/ pengeluaran jaringan Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/Internat, sehingga beroperasinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Polda NTB		Indeks pengoptimalan/penggelaran jaringan Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/Internat untuk mengukur sejauhmana perkembangan infrastruktur IT dalam mendukung operasi Kepolisian di wilayah hukum Polda NTB. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat ketersediaan sarana dan prasarana IT dalam mendukung operasi Kepolisian di wilayah hukum Polda NTB. Indeks Indeks pengoptimalan/penggelaran jaringan Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/Internat menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Rencana jumlah dukungan anggaran dan kegiatan pengoptimalan/ pengeluaran • Realisasi jumlah dukungan anggaran dan kegiatan pengoptimalan/ pengeluaran					
Target Kinerja		Base line	2025	2026	2027	2028	2029
		75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
Formula		Karakteristik					
I.Ops = (RLG : RNG) x 100% Keterangan : I.Ops = Indeks pengoptimalan/ pengeluaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet RLG = Realisasi jumlah dukgar dan kegiatan pengoptimalan/ pengeluaran RNG = Rencana jumlah dukgar dan kegiatan pengoptimalan/ pengeluaran		Satuan pengukuran			Polarisasi		
		Indeks			Maksimal		
		Dimensi			Periode Pemantauan		
		Kinerja Penunjang			Tahunan		
		Sumber Data					
		Satker jajaran Polda NTB					
		Pengampu Akuntabilitas				Pengesahan	
		Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
		Penghimpun Data				Pengesahan	
		Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					

TABEL. 5
d. Indeks Katpuan Fungsi TIK (IKP.2)

INDIKATOR KINERJA	SS.1 IKP.2 : Indeks Katpuan Fungsi TIK					
Indeks peningkatan kemampuan bidang IT sehingga meningkatnya keterampilan atau pengetahuan anggota Polri/PNS Polri di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Indeks peningkatan kemampuan fungsi TIK untuk mengukur sejauhmana perkembangan profesionalisme dan keterampilan anggota Bid TIK dalam mengoperasikan infrastruktur IT. Indeks peningkatan kemampuan fungsi TIK menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Rencana jumlah dukungan anggaran dan kegiatan katpuan fungsi TIK • Realisasi jumlah dukungan anggaran dan kegiatan katpuan fungsi TIK					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	75% (2,00)	75% (2,00)	79,3% (2,43)	79,4% (2,44)	79,5% (2,45)	79,6% (2,46)
Formula		Karakteristik				
IK = (RLG : RNG) x 100% <u>Keterangan :</u> IK = Indeks Katpuan Fungsi TIK RLK = Realisasi jumlah dukgar dan kegiatan katpuan fungsi TIK RNK = Rencana jumlah dukgar dan kegiatan katpuan fungsi TIK	Satuan pengukuran			Polarisasi		
	Indeks			Maksimal		
	Dimensi			Periode Pemantauan		
	Kinerja Penunjang			Tahunan		
	Sumber Data					
	Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
	Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data			Pengesahan		
	Subbidtekkom dan Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					

TABEL. 6
e. Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel (IKU.2)

INDIKATOR KINERJA	IKU.2 – SS.2. INDEKS KUALITAS DATA KEPOLISIAN YANG AKUNTABLE					
Indeks kulaitas data Kepolisian yang akuntable merupakan nilai dari indikator kinerja pendukung dengan pembagian masing-masing IKP pada sasaran strategis pertama Satker Bid TIK Polda NTB.	Indeks kualitas data Kepolisian yang akuntable mengukur kegiatan pengumpulan data dan penyajian data yang bertujuan memperoleh serta mendapatkan data serta menyajikan data yang valid sehingga terwujudnya pengembangan data yang berbasis IT dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktifitas, dan efisiensi kerja. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital. • Indeks Infrastruktur Strategis TIK menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Indeks pengumpulan data • Indeks pengolahan dan penyajian data					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)
Formula	Karakteristik					
$P_j = \frac{I.Pul.D + IJD}{2}$ Keterangan : P_j = Indeks kualitas data Kepolisian yang akuntable I.Pul.D = Indeks pengumpulan data IJD = Indeks pengolahan dan penyajian data	Satuan pengukuran		Polarisasi			
	Indeks		Maksimal			
	Dimensi		Periode Pemantauan			
	Kinerja Utama		Tahunan			
	Sumber Data					
	Satker jajaran Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
	Seluruh Subbid/Subbag Pada Satker Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data			Pengesahan		
	Subbidtekinfo					

TABEL. 7

f. Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data (IKP.3)

INDIKATOR KINERJA	SS.2 IKP.3 : Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data					
Indeks kegiatan pengumpulan data adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh serta mendapatkan data yang valid sehingga terwujudnya pengembangan data yang berbasis IT yang professional dan modern.	Indeks pengumpulan data untuk mengukur sejauhmana perkembangan data-data penting kepolisian yang terukur dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan. Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Rencana jumlah pengumpulan data. • Realisasi jumlah pengumpulan data.					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)
Formula	Karakteristik					
I.Pul.D = (RLG : RNG) x 100% <u>Keterangan :</u> I.Pul.D = Indeks pengumpulan data RLD = Realisasi pengumpulan data RND = Rencana pengumpulan data	Satuan pengukuran			Polarisasi		
	Indeks			Maksimal		
	Dimensi			Periode Pemantauan		
	Kinerja Penunjang			Tahunan		
	Sumber Data					
	Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB					
	Pengampu Akuntabilitas			Pengesahan		
	Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					
	Penghimpun Data			Pengesahan		
	Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran					

TABEL. 8
g. Indeks Pengolahan dan Penyajian Data (IKP.4)

INDIKATOR KINERJA	SS.2 IKP.4 : Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data					
Indeks kegiatan pengolahan dan penyajian data adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh dan mendapatkan data yang valid serta menyajikan data-data yang valid sehingga terwujudnya pengembangan data yang berbasis IT yang professional dan modern dalam membantu pimpinan mengambil keputusan	Indeks pengolahan dan penyajian data untuk mengukur sejauhmana perkembangan dan menyajikan data-data penting kepolisian yang terukur dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan. Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data menggunakan data dari indikator kinerja berikut: • Rencana jumlah pengolahan dan penyajian data. • Realisasi jumlah pengolahan dan penyajian data.					
Target Kinerja	Base line	2025	2026	2027	2028	2029
	85% (3)	86% (3,2)	87% (3,4)	88% (3,6)	89% (3,8)	90% (4)
Formula		Karakteristik				
IJD = (RLJ : RNJ) x 100% Keterangan : IJD = Indeks pengolahan dan penyajian data RLJ = Realisasi pengolahan dan penyajian data RNJ = Rencana pengolahan dan penyajian data		Satuan pengukuran		Polarisasi		
		Indeks		Maksimal		
		Dimensi		Periode Pemantauan		
		Kinerja Penunjang		Tahunan		
		Sumber Data				
		Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB				
		Pengampu Akuntabilitas		Pengesahan		
		Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran				
		Penghimpun Data		Pengesahan		
		Subbidtekinfo Bid TIK Polda NTB serta Sie TI Polres Jajaran				

/2. Capaian Indikator...

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan, tentang hasil capaian Indikator kinerja utama yang diwujudkan oleh Bid TIK Polda NTB, serta kedepan secara konsisten dan kontinue melakukan *review* terhadap indikator kinerja utama agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan yang diinginkan tentang capaian indikator kinerja utama Bid TIK Polda NTB.

TABEL. 9
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BID TIK T.A. 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern	Indeks infrastruktur strategis TIK. (IKU)	Indeks	81% (2,6)	78,33% (2,68)	97,31% (3,73)
Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern	Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern. (IKU.1)	Indeks	75% (2,00)	90,00% (3,55)	120,00% (4,90)
	Indeks kualitas data Kepolisian yang Akutable. (IKU.2)	Indeks	86% (3,2)	66,67% (1,81)	77,52% (2,55)
Terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akutable	Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet. (IKP.1)	Indeks	75% (2,00)	80,00% (2,50)	106,67% (4,80)
	Indeks Katpuan fungsi TIK. (IKP.2)	Indeks	75% (2,00)	100% (4,60)	133,33% (5,00)
	Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data. (IKP.3)	Indeks	86% (3,2)	75,33% (2,00)	87,60% (3,40)
	Indeks pengolahan dan penyajian data (IKP.4)	Indeks	86% (3,2)	58,00% (1,61)	67,44% (1,70)

3. Indikator Capaian Kinerja

Indikator Capaian Kinerja adalah pencapaian sasaran, target dan realisasi pada Satker Bid TIK Polda NTB dapat dilihat dari perbandingan capaian dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 (tabel 10 dan grafik 1 s.d. 7), sebagai berikut:

TABEL. 10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Bid TIK

Indikator Kinerja	2024			Indikator Kinerja	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase TIK yang professional dan modern (IKU)	87,50	59,65	68,17	Indeks infrastruktur strategis TIK. (IKU)	81% (2,6)	78,33% (2,68)	97,31% (3,73)
Persentase TIK pemenuhan Alkom (IKU.1)	73	19,30	26,44	Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern. (IKU.1)	75% (2,00)	90,00% (3,55)	120,00% (4,90)
Persentase Pengoperasian infrastruktur TIK (IKU.2)	102	100	98	Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel. (IKU.2)	86% (3,2)	66,67% (1,81)	77,52% (2,55)
Persentase kegiatan pengajuan renbut Alkomlek (IKP.1)	125	202	162	Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet. (IKP.1)	75% (2,00)	80,00% (2,50)	106,67% (4,80)
Persentase kegiatan pengoptimalan/ penggelaran jaringan Alkomlek (IKP.2)	100	100	100	Indeks Katpuan fungsi TIK. (IKP.2)	75% (2,00)	100,00% (4,60)	133,33% (5,00)
Persentase kegiatan pengoptimalan/ penggelaran Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (IKP.3)	83	100	120,5	Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data. (IKP.3)	86% (3,2)	75,33% (2,00)	87,60% (3,40)
Persentase Kegiatan pelatihan design grafis dan harwat Alkomlek (IKP.4)	100	100	100	Indeks pengolahan dan penyajian data (IKP.4)	86% (3,2)	58,00% (1,61)	67,44% (1,70)

/Dari penjelasan....

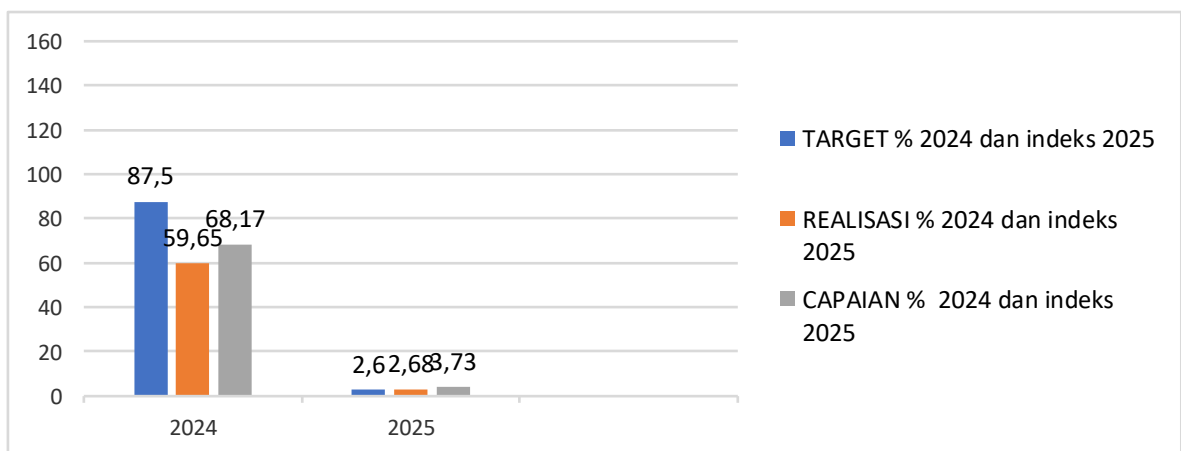
Dari penjelasan table.10 di atas, dapat dilihat bahwa presentase pencapaian pada Satker BID TIK yang terdiri dari :

- a. Indeks Infrastruktur Strategis TIK. (IKU)

Tabel.11
Indeks Infrastruktur Strategis TIK (IKU)

Indikator Kinerja	2024			Indikator Kinerja	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (Indeks)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase TIK yang profesional dan modern (IKU)	87,50	59,65	68,17	Indeks infrastruktur strategis TIK. (IKU)	81% (2,6)	78,33% (2,68)	97,31% (3,73)

Grafik. 1
Indeks Infrastruktur Strategis TIK (IKU)



Pada grafik.1 diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian kinerja Indeks infrastruktur strategis TIK pada tahun 2025 mencapai bahkan melebihi target yang direncanakan (2,6) yaitu sebesar 3,73.

Dalam pencapaian terget capaian tersebut tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga diharapkan pencapaian terget kinerja ke tahun berikutnya dapat tercapai.

Dalam usaha pencapaian terget kinerja tersebut diatas Satker BID TIK selalu berkoordinasi dalam segala lini baik secara kedalam maupun keluar.

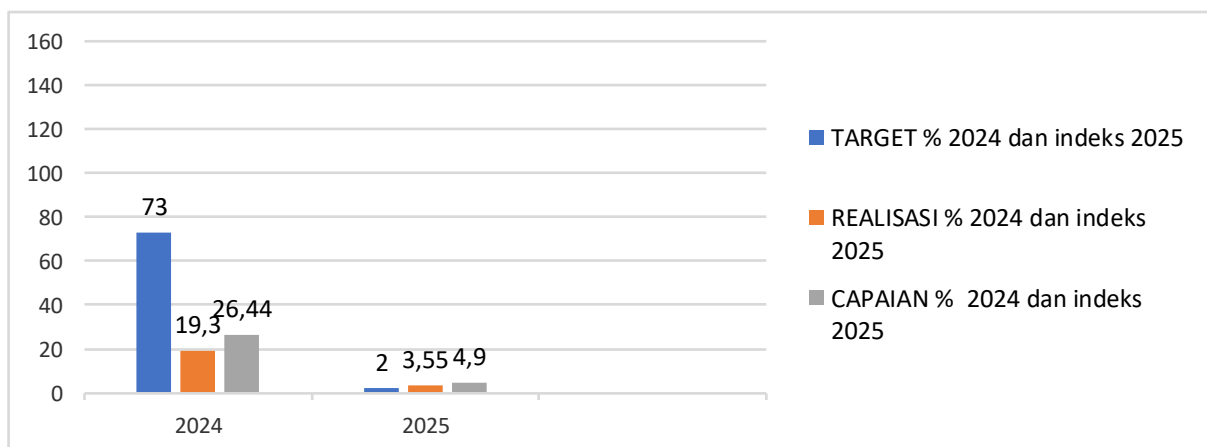
/b. Indeks ...

b. Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern. (IKU.1)

Tabel.12
Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern (IKU.1)

Indikator Kinerja	2024			Indikator Kinerja	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (Indeks)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase pemenuhan TIK Alkom (IKU.1)	73	19,30	26,44	Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern. (IKU.1)	75% (2,00)	90% (3,55)	120% (4,90)

Grafik. 2
Perbandingan Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern (IKU.1)



Pada grafik.2 diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian kinerja Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern pada tahun 2025 mencapai bahkan melebihi target yang direncanakan (2,00) yaitu sebesar 4,90.

Dalam pencapaian terget capaian tersebut tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga diharapkan pencapaian terget kinerja ke tahun berikutnya dapat tercapai.

Dalam usaha pencapaian terget kinerja tersebut diatas Satker BID TIK selalu berkoordinasi dalam segala lini baik secara kedalam maupun keluar.

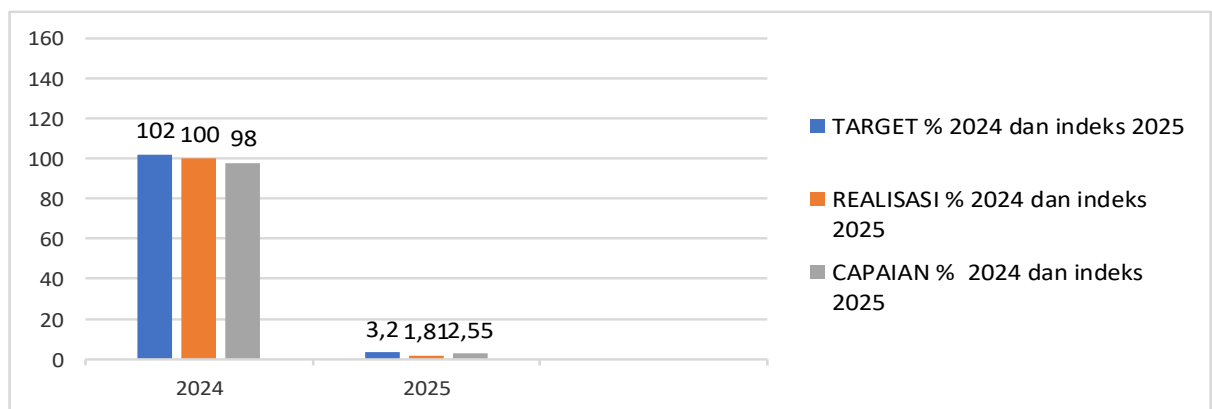
/c. Indeks...

- c. Indeks kualitas data Kepolisian yang Akutable. (IKU.2)

Tabel.13
Indeks kualitas data Kepolisian yang Akutable. (IKU.2)

Indikator Kinerja	2024			Indikator Kinerja	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (Indeks)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Pengoperasian infrastruktur TIK (IKU.2)	102	100	98	Indeks kualitas data Kepolisian yang Akutable. (IKU.2)	86% (3,2)	66,67% (1,81)	77,52% (2,55)

Grafik. 3
Indeks kualitas data Kepolisian yang Akutable. (IKU.2)



Pada grafik.3 diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian kinerja Indeks kualitas data Kepolisian yang Akutable pada tahun 2025 tidak mencapai target yang direncanakan (3,2) yaitu sebesar 2,55, Ini dikarenakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh Bid TIK masih tergantung pada kegiatan dan kepentingan organisasi yang tidak dapat diperkirakan jumlah nya.

Dalam pencapaian terget capaian tersebut tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga diharapkan pencapaian terget kinerja ke tahun berikutnya dapat tercapai.

Dalam usaha pencapaian terget kinerja tersebut diatas Satker BID TIK selalu berkoordinasi dalam segala lini baik secara kedalam maupun keluar.

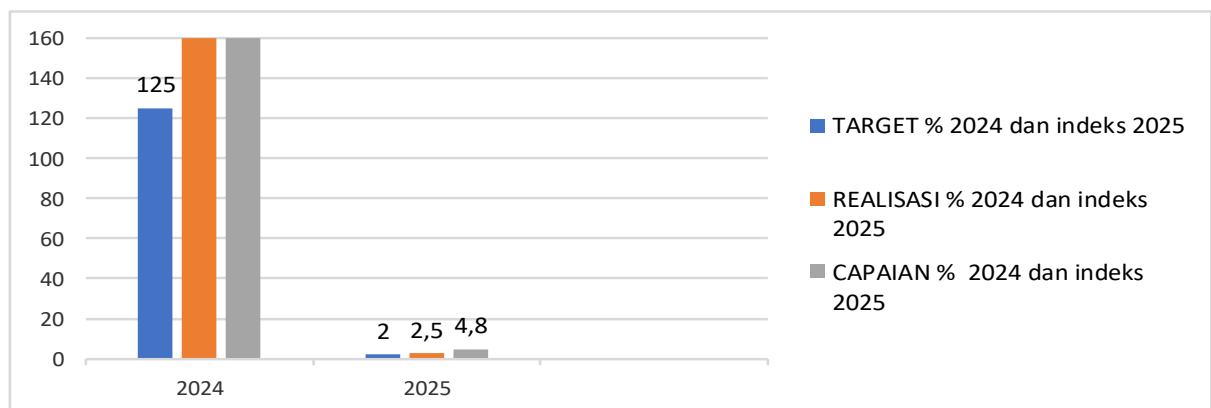
/d. Indeks...

- d. Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (IKP.1)

Tabel.14
Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (IKP.1)

Indikator Kinerja	2024			Indikator Kinerja	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (Indeks)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase kegiatan pengajuan renbut Alkomlek (IKP.1)	125	202	162	Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet. (IKP.1)	75% (2,00)	80% (2,50)	106,67% (4,80)

Grafik. 4
Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (IKP.1)



Pada grafik.4 diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian kinerja Indeks pengoptimalan/ penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet pada tahun 2025 mencapai bahkan melebihi target yang direncanakan (2,00) yaitu sebesar 4,8.

Dalam pencapaian terget capaian tersebut tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga diharapkan pencapaian terget kinerja ke tahun berikutnya dapat tercapai.

Dalam usaha pencapaian terget kinerja tersebut diatas Satker BID TIK selalu berkoordinasi dalam segala lini baik secara kedalam maupun keluar.

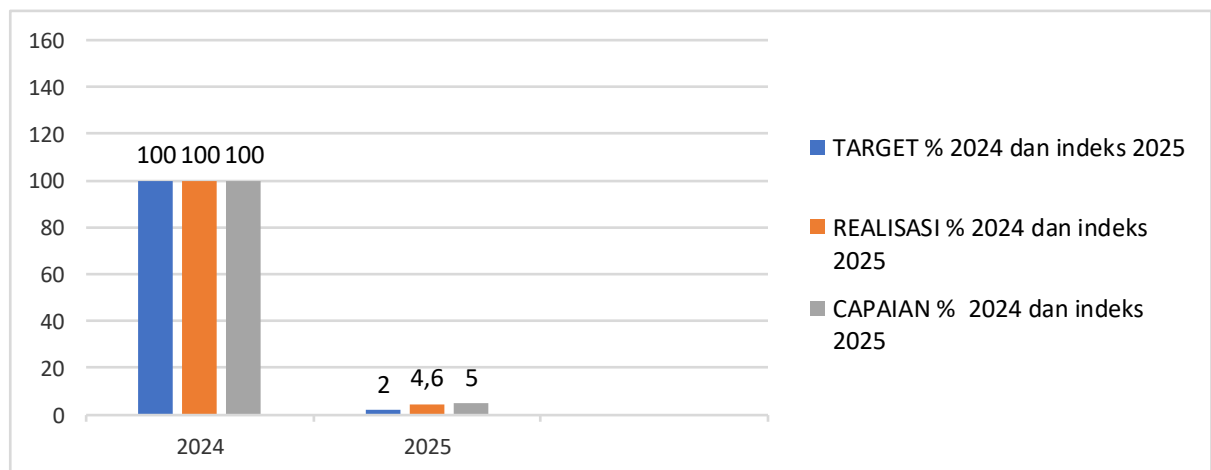
/e. Indeks...

e. Indeks Katpuan Fungsi TIK_(IKP.2)

Tabel.15
Indeks Katpuan Fungsi TIK (IKP.2)

Indikator Kinerja	2024			Indikator Kinerja	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (Indeks)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase kegiatan pengoptimalan/ penggelaran jaringan Alkomlek (IKP.2)	100	100	100	Indeks Katpuan fungsi TIK. (IKP.2)	75% (2,00)	100% (4,60)	133,33% (5,00)

Grafik. 5
Perbandingan Indeks Katpuan Fungsi TIK (IKP.2)



Pada grafik.5 diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian kinerja Indeks Katpuan fungsi TIK pada tahun 2025 mencapai bahkan melebihi target yang direncanakan (2,00) yaitu sebesar 5,00.

Dalam pencapaian terget capaian tersebut tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga diharapkan pencapaian terget kinerja ke tahun berikutnya dapat tercapai.

Dalam usaha pencapaian terget kinerja tersebut diatas Satker BID TIK selalu berkoordinasi dalam segala lini baik secara kedalam maupun keluar.

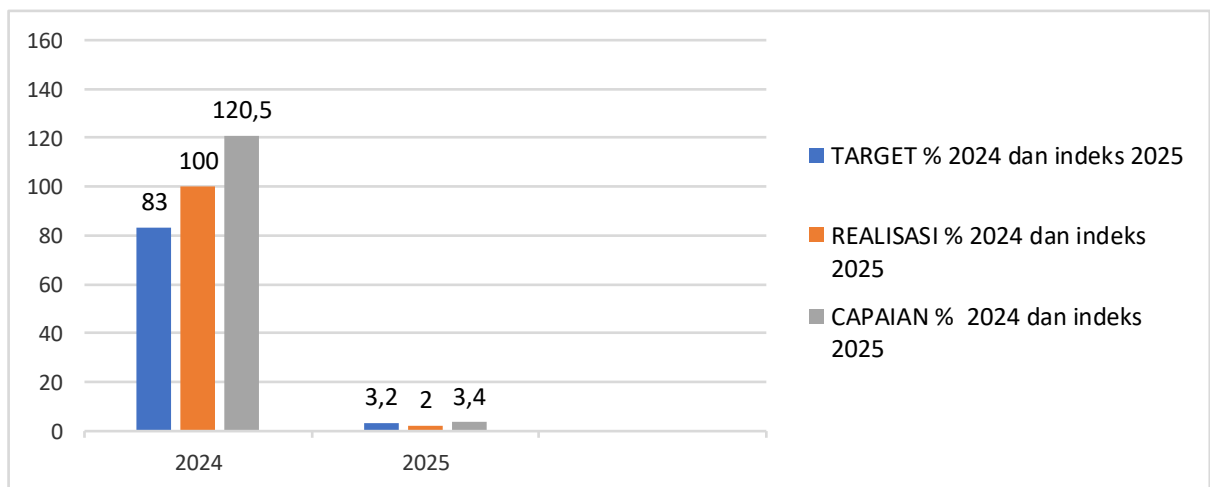
/f. Indeks...

f. Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data (IKP.3)

Tabel.16
Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data (IKP.3)

Indikator Kinerja	2024			Indikator Kinerja	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (Indeks)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase kegiatan pengoptimalan/ penggelaran Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet (IKP.3)	83	100	120,5	Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data. (IKP.3)	86% (3,2)	75,33% (2,00)	87,60% (3,40)

Grafik. 6
Indeks Permohonan Permintaan dan Pengumpulan Data (IKP.3)



Pada grafik.6 diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian kinerja Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data pada tahun 2025 mencapai bahkan melebihi target yang direncanakan (3,2) yaitu sebesar 3,40.

Dalam pencapaian terget capaian tersebut tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga diharapkan pencapaian terget kinerja ke tahun berikutnya dapat tercapai.

Dalam usaha pencapaian terget kinerja tersebut diatas Satker BID TIK selalu berkoordinasi dalam segala lini baik secara kedalam maupun keluar.

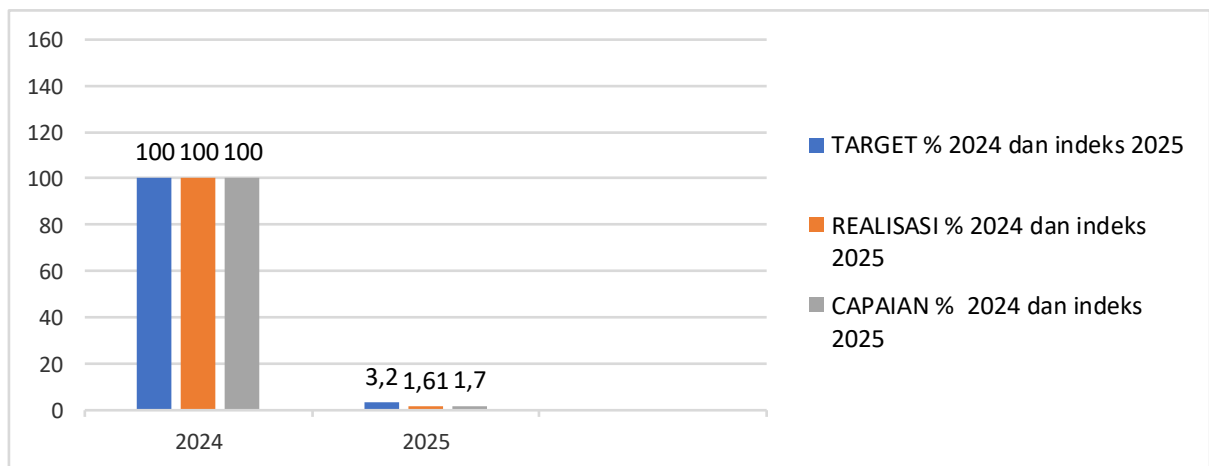
/g. Indeks...

g. Indeks Pengolahan dan Penyajian Data (IKP.4)

Tabel.17
Indeks Pengolahan dan Penyajian Data (IKP.4)

Indikator Kinerja	2024			Indikator Kinerja	2025		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	Capaian (Indeks)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Kegiatan pelatihan design grafis dan harwat Alkomlek (IKP.4)	100	100	100	Indeks pengolahan dan penyajian data (IKP.4)	86% (3,2)	58,00% (1,61)	67,44% (1,70)

Grafik. 7
Indeks Pengolahan dan Penyajian Data (IKP.4)



Pada grafik.7 diatas dapat dilihat bahwa indikator capaian kinerja Indeks pengolahan dan penyajian data pada tahun 2025 tidak mencapai target yang direncanakan (3,2) yaitu sebesar 1,70, Ini dikarenakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh Bid TIK masih tergantung pada kegiatan dan kepentingan organisasi yang tidak dapat diperkirakan jumlah nya.

Dalam pencapaian terget capaian tersebut tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga diharapkan pencapaian terget kinerja ke tahun berikutnya dapat tercapai.

Dalam usaha pencapaian terget kinerja tersebut diatas Satker BID TIK selalu berkoordinasi dalam segala lini baik secara kedalam maupun keluar.

/B. Akuntabilitas Keuangan...

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Pendekatan penyusunan

Dalam penyusunan pelaporan keuangan yang terkait dengan neraca keuangan, transaksi keuangan di Bid TIK Polda NTB telah disesuaikan dengan transaksi keuangan yang berlaku di Departemen/Lembaga lain, mengingat sistem Akuntansi Pemerintah sudah diberlakukan di Lingkungan Polri. Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Keuangan mengacu pada neraca sebagaimana ditetapkan oleh badan Akuntansi Pemerintah.

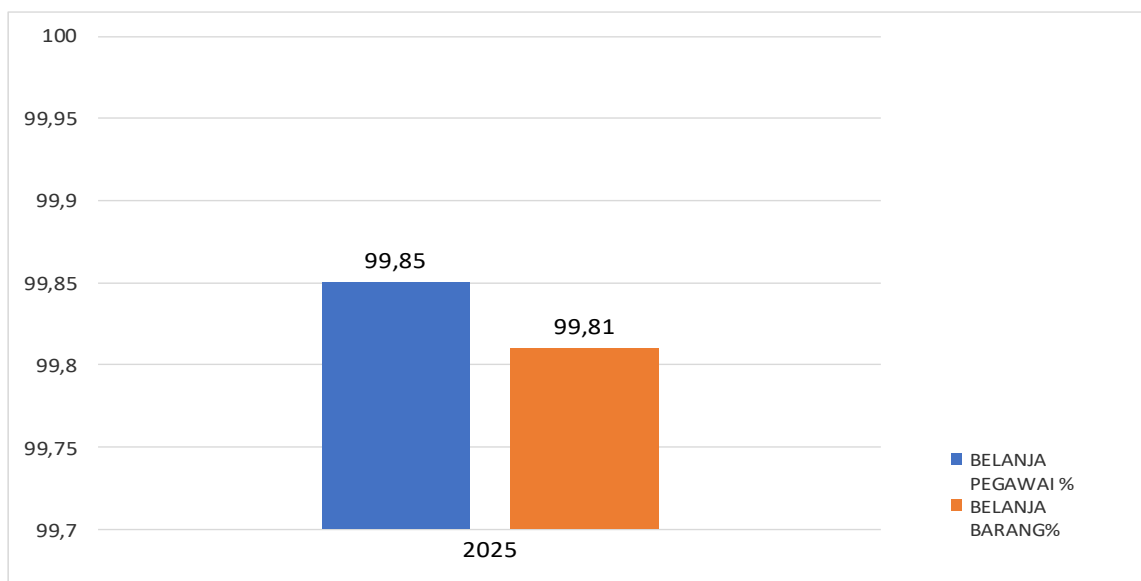
2. Kebijakan Akuntansi

TABEL. 11
REALISASI ANGGARAN PERJENIS BELANJA T.A. 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI				TOTAL REAL	% REAL
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	PEGAWAI	3,948,410,000	1,153,987,406	1,075,439,858	842,000,700	871,027,934	3,942,455,898	99,85
2	BARANG	4,922,823, ,000	1,442,087,555	1,278,473,561	1,165,239,458	1,027,497,438	4,913,298,012	99,81
3	MODAL	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		8,871,233,000	2,596,074,961	2,353,913,419	2,007,240,158	1,898,525,372	8,855,753,910	99,83

Sumber Data OM SPAN

Graffik.8
REALISASI ANGGARAN PERJENIS BELANJA T.A. 2025



/Kebijakan...

Kebijakan Akuntansi pada pembuatan pelaporan neraca tahun 2025 ini, mendasari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum oleh pemerintah, walaupun standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Adapun realisasi anggaran Bid TIK Polda NTB TA 2025 per 31 Desember 2025 dengan jumlah pagu DIPA Bid TIK Polda NTB sebesar Rp **8,871,233,000** realisasi sebesar Rp**8,855,753,910**, sisa **Rp. 29,733,388,-**. Minus ini terjadi pada anggaran belanja pegawai dan belanja barang Bid TIK Polda NTB (lihat tabel. 11 dan 12).

TABEL. 12
DETAIL PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SATKER BID TIK T.A. 2025

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
060.01.02.BP	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	1,539,442,000,-	1,539,440,093,-	1,907,-	99,99%
5059.EAA 002	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	1,539,442,000,-	1,539,440,093,-	1,907,-	99,99%
060.01.01.WA	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	7.323.741.000,-	7.316.314.023,-	7.388.577,-	99,90%
3071.EAC 003	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	154.782.000,-	154.743.600,-	38.400,-	99,98%
3073	Dukungan Pelayanan internal perkantoran Polri	7.168.959.000,-	7.161.570.423,-	7.388.577,-	99,90%
3073.EBA.994	Pelayanan perkantoran	7,168,959,000,-	3.219.114.319,-	7.280.024,-	100,56%
001	Pembayaran gaji dan tunjangan	3.948.410.000,-	3.930.357.657,-	5.845.343,-	99,54%
002	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor	3.220.549.000,-	3.219.114.319,-	1.434.681,-	99,96%
3073.EBA.962 003	Layanan dukungan manajemen internal perkantoran	26.050.000,-	26.048.000,-	2.000,-	99,99%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun capaian sasaran inti (SI) Infrastruktur TIK strategis Kepolisian yang berdayaguna dan modern serta indikator kinerja utama (IKU) Satker Bid TIK Polda NTB TA.2025 Indeks infrastruktur strategis TIK, target 2,91 dengan realisasi 3,63 serta capaian 4,70 dengan uraian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis.1 yaitu Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern pada Satker Bid TIK Polda NTB TA.2025 meliputi:
 - a. Indeks Infrastruktur SPBE yang Profesional dan modern. (IKU.1) target 2,61 dan realisasi 4,0 serta dengan capaian 4,85;
 - b. Indeks kualitas data Kepolisian yang Akuntabel (IKU.2), target 3,20 dan realisasi 2,50 serta dengan capaian 4,30;
2. Sasaran Strategis.2 yaitu terpenuhinya kualitas data Kepolisian yang Akuntabel dengan di dukung 4 (empat) Indikator Kinerja Pendukung (IKP), sebagai berikut :
 - a. Indeks pengoptimalan/penggelaran Alkomlek, Multimedia dan jaringan VPN-IP/internet. (IKP.1) dengan target 2,61 dan realisasi 2,50 serta dengan capaian 5,0;
 - b. Indeks Katpuan fungsi TIK. (IKP.2) dengan target 2,61 dan realisasi 4,60 serta dengan capaian 4,30;
 - c. Indeks permohonan permintaan dan pengumpulan data. (IKP.3) dengan target 3,20 dan realisasi 4,20 serta dengan capaian 4,85;
 - d. Indeks pengolahan dan penyajian data (IKP.4) dengan target 3,20 dan realisasi 2,30 serta dengan capaian 3,20;
3. Dalam pencapaian terget capaian tersebut tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga diharapkan pencapaian terget kinerja ke tahun berikutnya dapat tercapai, dan dalam usaha pencapaian terget kinerja tersebut diatas Satker BID TIK selalu berkoordinasi dalam segala lini baik secara kedalam maupun keluar.

/4. Pelaksanaan....

4. Pelaksanaan tugas-tugas Satker Bid TIK Polda NTB dengan berbagai sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) serta Penetapan Kinerja Bid TIK Polda NTB tahun 2025 telah dapat dilaksanakan oleh seluruh Sub-Satker yang ada di Bid TIK Polda NTB.

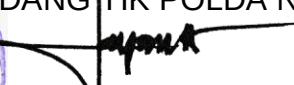
B. Saran Tindakan Lanjut :

1. Melakukan koordinasi dengan DIV TIK Polri dan rekanan perihal pemenuhan renbut Alkomlek serta penyediaan sparepart perangkat Alkomlek yang mengalami kerusakan;
2. Meningkatkan pengetahuan anggota dibidang teknologi informasi dan komunikasi dengan melaksanakan pelatihan secara berkala;
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan secara on the job training kepada anggota perihal pengoperasian dan perawatan perangkat sound system dan multi media.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Bid TIK Polda NTB TA 2025 disusun diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Satker Bid TIK Polda NTB. Dalam penyusunan laporan ini secara jujur sangat disadari belum sempurna dan dapat menyajikan prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tupoksi yang telah dilakukan oleh Sub Satker Bid TIK Polda NTB selama satu tahun, dan pada tahun mendatang Satker Bid TIK Polda NTB akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Mataram, Januari 2026

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB



YAYAN HARTADI, S.I.K.

KOMIASARIS BESAR POLISI NRP 71080520





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BIDANG TIK POLDA NTB
TA. 2025**

*
*
* * *
* * *
* * *
* * *
* 0 *
* 0 *
* 0 *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

Mataram, Januari 2026

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	8
1. Visi	8
2. Misi	8
3. Tujuan	9
4. Sasaran Prioritas	10
5. Arah Kebijakan dan Strategi BID TIK.....	10
B. Penetapan Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	22
3. Indikator Capaian Kinerja.....	23
B. Akuntabilitas Keuangan.....	31
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran Tindakan Lanjut.....	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Bid TIK Polda NTB Tahun 2025 ;	
2. Data Evaluasi Capaian Kinerja Polda NTB pada Satker Bid TIK Polda NTB T.A. 2025;	
3. Rencana Aksi PK T.A. 2025;	
4. Dokumentasi kegiatan Bid TIK Polda NTB T.A. 2025.	
5. Surat Perintah Tim Penyusun LKIP Satker Bid TIK Polda NTB	

DAFTAR TABEL

	<u>Hal</u>
Tabel. 1a Data Alkom Bid TIK 2025	8
Tabel. 1 Penetapan/Perjanjian Kinerja Bid TIK TA. 2025	12
Tabel. 2 Persentase TIK yang Profesional dan Modern	15
Tabel. 3 Persentase Pemenuhan Alkom	16
Tabel. 4 Persentase Pengoperasian Infrastruktur TIK	17
Tabel. 5 Persentase Kebutuhan Alkomlek	18
Tabel. 6 Persentase Pengoptimalan/Penggelaran Jaringan Alkomlek	19
Tabel. 7 Persentase Pengoptimalan/Penggelaran Multimedia dan jaringan VPN-IP/Internet	20
Tabel. 8 Persentase Pelatihan Design Grafis dan Harwat Alkomlek	21
Tabel. 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Bid TIK T.A. 2025	22
Tabel. 10 Perbandingan Indikator Kinerja Utama Satker Bid TIK T.A. 2025	23
Tabel. 11 Realisasi Anggaran Perjenis Belanja	31
Tabel. 12 Detail Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Bid TIK T.A. 2025	32

DAFTAR GRAFIK

	<u>Hal</u>
Grafik. 1 Perbandingan Persentase TIK yang Profesional dan modern	24
Grafik. 2 Perbandingan Persentase TIK Pemenuhan Alkom	25
Grafik. 3 Perbandingan Persentase Pengoperasian Infrastruktur TIK	26
Grafik. 4 Perbandingan Persentase Kegiatan Pengajuan Renbut Akomlek	27
Grafik. 5 Perbandingan Persentase Kegiatan Pengotimalan/Penggelaran Jaringan Alkomlek	28
Grafik. 6 Perbandingan Persentase Kegiatan Pengotimalan/Penggelaran Multimedia dan Jaringan VPN-IP/Internet	29
Grafik. 7 Perbandingan Persentase Kegiatan Pelatihan Design Grafis dan Harwat Alkomlek	30

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



SURAT PERINTAH
Nomor. : Sprin / 1 //REN. 3.1./2026

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kelancaran tugas Penyusunan LKIP pada Satker Bidang TIK Polda NTB dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : Surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor: B/7046/XII/REN.3.1./2025/Rorena tanggal 18 Desember 2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan T.A. 2025.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari agar melaksanakan tugas menyusun LKIP Bidang TIK Polda NTB Tahun Anggaran 2025.
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang TIK Polda NTB.
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan : Mataram
pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BIDANG POLDA NTB



YAYAN HARTADI, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520

Tembusan :

1. Kapolda NTB
2. Irwasda Polda NTB

DAFTAR TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
SATKER BID TIK POLDA NTB TA. 2025.

NO	N A M A	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM TEAM
1	YAYAN HARTADI, S.I.K.	KOMBES POL	KABID TIK POLDA NTB	PENANGGUNG JAWAB
2	I KADEK SUPARTA, A.Md	AKBP	KASUBBIDTEKINFO	KETUA
3	I PUTU WIRANA, S.I.P	KOMPOL	PS. KASUBBIDTEKKOM	WAKIL KETUA
4	LALU ARYA WIRAWAN	IPTU	PS.KAURMINTU	SEKRETARIS
5	I NYM KARYASA,S.H.	AIPTU	PS. KAURKEU SUBBAGRENMIN	ANGGOTA
6	NAZARIZAL, AMK	PENATA	PS. PAMIN 1 SUBBAGRENMIN	ANGGOTA
7	RIKY FIRMANSYAH	BRIGADIR	BAMIN RENMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA

Ditetapkan : Mataram
pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BIDANG TIK POLDA NTB



YAYAN HARTADI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71080520